

MODEL PENYELENGGARAAN EKONOMI KERAKYATAN DI KOTA YOGYAKARTA BERBASIS INDEKS DEMOKRASI EKONOMI

Awan Santosa

Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Abstract

This study aims to arrange model of economic democracy implementation in Yogyakarta City. Model arrangement based on Index of Economic Democracy and various research method such as legal and planning document review. Modelling result there are three dimension for economic democracy implementation in Yogyakarta, here are intellectual, institutional, and material capital democratization. Yogyakarta City must develop center for economic democracy consist of budgeting, financing, trading, training, social safety, and cooperative center.

Keywords: economic democracy, social and material capital

1.1. Latar Belakang

Konsep demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan sudah lama dipikirkan dan dikembangkan secara khusus oleh pakar ekonomi di dalam maupun di luar negeri dengan berbagai varian pengertian dan ciri-cirinya (Douglas (1920), Carnoy (1980), Dahl (1985), Poole (1987), dan Smith (2000)). Konsep ini bahkan sudah dipikirkan ekonom Indonesia, khususnya M. Hatta, sejak tahun 1930 yang kemudian dirumuskan ke dalam konstitusi (Pasal 33 UUD 1945). Konsep ini terus dikembangkan oleh ekonom-ekonom Indonesia dengan berbagai ragam terminologi (Mubyarto (1980), Swasono (1987), Arief (2000), dan Baswir (2002)).

Namun perkembangan pemikiran ke arah demokrasi ekonomi ini tidak diikuti perkembangan bangunan konsep, teori, dan operasionalisasi demokrasi ekonomi. Sampai saat ini belum ada suatu indikator yang menjadi ukuran penyelenggaraan demokrasi ekonomi baik di dalam maupun

luar negeri. Demokrasi ekonomi masih sebatas konsep yang bersifat filosofis, normatif, dan politis. Belum tersedianya model dan alat ukur ini menjadikan agenda-agenda pembangunan daerah yang berbasis demokrasi ekonomi terlalu abstrak dan tidak memiliki arah yang jelas.

Kondisi ini tidak terlepas dari bias konseptual di mana pemahaman publik terhadap demokrasi terdistorsi hanya sebatas demokrasi pada dimensi politik (demokrasi politik). Kondisi yang merupakan fenomena global ini mendorong ketimpangan perkembangan konsepsi demokrasi di dunia, terutama di negara-negara bekas jajahan seperti halnya Indonesia. Saat ini terdapat setidaknya delapan Indeks Demokrasi Politik yang mengukur kebebasan politik, pemilu, partisipasi rakyat, dan fungsi lembaga negara (Ericcson & Lane, 2002). Baru tataran demokrasi politik inilah yang dikorelasikan dengan indikator sosial-

ekonomi seperti pertumbuhan dan pembangunan manusia.

Korelasi tersebut dapat ditemukan pada berbagai model yang dikembangkan berdasar studi empiris di negara-negara tertentu. Model "*Virtuous Trangle*" melihat bahwa pembangunan manusia akan menjadi jalan bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi dan demokrasi yang selanjutnya akan berkorelasi positif satu sama lain (UNSFIR dalam Kuncoro, 2004). Selain itu terdapat model "*Cruel Choice plus Trickle Down*" yang meletakkan pertumbuhan ekonomi sebagai prasyarat munculnya demokrasi dan pembangunan manusia (*ibid*).

Adapun model pertumbuhan endogen dan demokrasi versi Barro melihat posisi pembangunan manusia sebagai variabel paling penting dalam menunjang terjadinya pertumbuhan ekonomi yang akan menjadi prasyarat bagi berkembangnya demokrasi. Model yang agak berbeda dikembangkan oleh Balla, di mana demokrasi justru menjadi pilar kunci bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menghasilkan perbaikan kualitas pembangunan manusia di suatu negara (*ibid*).

Sementara itu, indikator spesifik yang sudah ada justru tersedia untuk mengukur liberalisasi ekonomi dunia, yaitu *Index of Economic Freedom* (The Heritage Foundation, 1980). Indeks ini mengukur derajat kebebasan ekonomi yang berorientasi pada kemakmuran individual

melalui kebebasan dalam bisnis, fiskal, moneter, perdagangan, investasi, keuangan, pemerintahan, korupsi, HAKI, dan kebebasan buruh. Indeks ini sudah menjadi variabel bebas yang dikorelasikan dengan GDP perkapita, pengangguran, dan inflasi.

Ketiadaan model operasional Ekonomi kerakyatan menjadi masalah di tengah adanya fenomena ketimpangan dan ketidakadilan sosial-ekonomi di Indonesia saat ini. Permasalahan yang mendasar adalah ketiadaan dasar bagi pemerintah untuk terus mengembangkan strategi kebijakan yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Berdasar landasan normatif-konseptual dan realitas objektif kekinian tersebut muncul kebutuhan baik di ranah pengembangan ilmu (teoritis) maupun praktis, untuk memformulasikan model pengukuran derajat Ekonomi kerakyatan di Indonesia, yang secara khusus dapat diterapkan pada setiap daerah di Indonesia.

Model ini dapat digunakan sebagai dasar indikator komprehensif yang dapat dijadikan sebagai acuan penyelenggaraan dan penilaian derajat keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan strategi kebijakan yang memihak kepada rakyat. Bagi pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia hasil dari pemodelan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk terus mengembangkan strategi kebijakan yang dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Penelitian ini menjadikan Kota Yogyakarta sebagai pemodelan ekonomi kerakyatan yang harapannya dapat dikembangkan di daerah lain di Indonesia.

1.2. Perumusan Masalah

Sebagai salah satu **daerah perkotaan**, Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai peranan besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekonomi kerakyatan. Pengembangan ekonomi kerakyatan akan membantu Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan kesejahteraan warga kota. Gagasan ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya alternatif dari para ahli ekonomi Indonesia untuk menjawab kegagalan yang dialami oleh negara negara berkembang termasuk Indonesia dalam menerapkan teori pertumbuhan.

Penerapan teori pertumbuhan yang telah membawa kesuksesan di negara negara kawasan Eropa ternyata telah menimbulkan kenyataan lain di sejumlah bangsa yang berbeda. Salah satu harapan agar hasil dari pertumbuhan tersebut bisa dinikmati sampai pada lapisan masyarakat paling bawah, ternyata banyak rakyat di lapisan bawah tidak selalu dapat menikmati cucuran hasil pembangunan yang diharapkan itu. Bahkan di kebanyakan negara negara yang sedang berkembang, kesenjangan sosial ekonomi semakin melebar. Dari pengalaman ini, akhirnya dikembangkan berbagai alternatif terhadap konsep pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan.

Pertumbuhan ekonomi tetap merupakan pertimbangan prioritas, tetapi pelaksanaannya harus serasi dengan pembangunan nasional yang berintikan pada manusia pelakunya. Dengan demikian Ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi jaringan harus mengadopsi teknologi tinggi sebagai faktor pemberi nilai tambah terbesar dari proses ekonomi itu sendiri. Faktor skala ekonomi dan efisien yang akan menjadi dasar kompetisi bebas menuntut keterlibatan jaringan ekonomi rakyat, yakni berbagai sentra-sentra kemandirian ekonomi rakyat, skala besar kemandirian ekonomi rakyat, skala besar dengan pola pengelolaan yang menganut model siklus terpendek dalam bentuk yang sering disebut dengan pembeli .

1.3. Tujuan Penelitian

- 1). Memaparkan penerapan Demokrasi Ekonomi di Kota Yogyakarta, Propinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2009/2010
- 2). Menyusun model strategi implementasi dalam bentuk konsep dan lembaga pelaksana dalam menjalankan program pengembangan ekonomi kerakyatan di Kota Yogyakarta.
- 2). Merumuskan analisis terhadap kebijakan kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan di kota Yogyakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1) Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan pengukuran tingkat penerapan demokrasi ekonomi bagi daerah lain di Indonesia, yang kemudian dapat diperbandingkan dengan dan dievaluasi perkembangannya dari tahun ke tahun.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi temuan variabel baru yang dapat dikorelasikan (menjelaskan) berbagai fenomena ekonomi daerah di Kota Yogyakarta dan daerah lainnya seperti halnya kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, inflasi, pendapatan riil (perkapita), pertumbuhan, dan variabel makro-ekonomi lain di Indonesia.
- 3) Hasil penelitian ini dapat menjadi sarana mendorong pengarusutamaan aspek pemerataan dan keadilan dalam pembangunan ekonomi selain aspek pertumbuhan dan efisiensi di Kota Yogyakarta dan daerah lain di seluruh Indonesia.

1.5. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pengelompokan data yang bersifat kualitatif. Metode ini menggambarkan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan sedang berlangsung dengan jalan

mengumpulkan, menyusun dan menjelaskan data yang diperoleh untuk kemudian dianalisis sesuai dengan teori yang ada. Obyek yang akan diteliti yaitu pengembangan ekonomi kerakyatan Kota Yogyakarta, dengan unit analisis pada level organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta.

Beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

1) Wawancara

Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

2) Dokumen

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti

untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan *flashdisk*, data tersimpan di website, dan lain-lain.

3) *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) adalah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkap pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. FGD juga dimaksudkan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti.

4) Pengukuran Indeks Demokrasi Ekonomi

Penelitian ini menggunakan alat analisis Indeks Demokrasi Ekonomi (IDE) yang diformulasikan dari penelitian Awan Santosa (2009) bersama 10 ahli demokrasi ekonomi Indonesia dengan metode Delphi. Variabel yang dinilai sesuai oleh para-ahli dan mencapai nilai skor di atas batas minimum persetujuan, sehingga dapat dijadikan sebagai unsur penyusun Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia (IDEI) adalah sebanyak 21 variabel yang terbagi dalam 3 Dimensi, yaitu:

- A. Dimensi Demokrasi Produksi
- B. Dimensi Demokrasi Alokasi dan Konsumsi
- C. Dimensi Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi

1.6. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1.6.1. Profil Ekonomi Kerakyatan Kota Yogyakarta

Ekonomi kerakyatan sepertihalnya tertuang dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 adalah sebuah sistem, yang dibedakan tegas dengan ekonomi rakyat atau UMKM yang hanya merujuk pada aktor pelaku ekonomi. Sebagai sebuah sistem ekonomi, maka ekonomi kerakyatan mencakup dimensi produksi (termasuk penguasaan faktor produksi), distribusi, dan konsumsi.

Dalam penjelasan Pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa ekonomi kerakyatan adalah (sistem) perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, di mana produksi dikerjakan oleh semua (Pasal 27 ayat 2), untuk semua (Pasal 23, 31, dan 34), di bawah pimpinan dan atau penilikan anggota-anggota masyarakat (Pasal 18 dan 28).

Oleh karenanya, urgensi ekonomi kerakyatan di samping didasarkan pada amanat konstitusi di atas, diperkuat juga dengan beberapa kondisi empiris (realitas) sosial-ekonomi makro penyelenggaraan ekonomi kerakyatan di Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Pertama, tingkat pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta masih sebesar

18,241 orang atau sebesar 6,21%, yang berarti belum sepenuhnya warga terlibat dalam proses produksi daerah. Data lain menyebutkan bahwa baru 58,8% usia kerja yang sepenuhnya bekerja, sehingga dapat diperkirakan pengangguran tersembunyi di Kota Yogyakarta masih cukup tinggi. Pun, mayoritas warga bekerja di sektor perdagangan dengan share terhadap PDRB 25%, didominasi subsector perdagangan besar, hotel, dan restoran, dan bekerja di sektor jasa dengan share 20%, di dominasi sektor jasa layanan pemerintahan. Hal ini mengindikasikan begitu banyak warga bekerja dengan hasil yang belum layak bagi kemanusiaan. Data menunjukkan kinerja pengangguran di Kota Yogyakarta. Dalam kurun waktu tiga tahun (2008-2010) terjadi penurunan angka pengangguran sebesar 2,73% dari 7,13% pada tahun 2008 menjadi 4,4% pada tahun 2010.

Kedua, jumlah penduduk miskin masih sebanyak 54.530 jiwa atau sebesar 8,2% dari total penduduk pada tahun 2011, dengan jumlah keluarga (KK) miskin sebanyak 17.016 KK atau sebesar 12,38%. Nilai ini dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 210.000,-/orang/bulan, sehingga jika menggunakan garis kemiskinan Bank Dunia (\$US 2/orang/hari) maka dapat diperkirakan tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta sebesar 33% dan KK miskin sebanyak 49%. Kondisi ini berlangsung di tengah ketimpangan struktural dan over produksi di Kota Yogyakarta, di mana terdapat dominasi subsector usaha besar di sektor

perdagangan, hotel, restoran, jasa, pengangkutan, dan industri pengolahan.

Sementara itu, sektor perhotelan yang kian banyak dibangun di Kota Yogyakarta didominasi oleh usaha (pemodal) besar. Demikian halnya sektor perdagangan Kota Yogyakarta pun juga didominasi oleh distributor dan pemodal besar. Sementara masyarakat dan komunitas rakyat di Kota Yogyakarta belum terlibat dan atau memanfaatkan sepenuhnya potensi dan peluang sektor pariwisata dan perdagangan. Keterlibatan rakyat masih pada kegiatan-kegiatan ekonomi dan usaha yang marjinal dan informal.

Ketiga, tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat yang masih tinggi pula, di mana DAU meliputi 59,4% APBD, DBHBP sebesar 9,27%, sedangkan PAD adalah sebesar 21,86%. Dalam hal ini perekonomian belum sepenuhnya mandiri dan di bawah pimpinan dan atau penilikan anggota-anggota masyarakat Kota Yogyakarta. PAD yang cukup tinggi dapat menandakan berkembangnya ekonomi dan industri kreatif di Kota Yogyakarta, namun dapat pula mengindikasikan masih banyaknya biaya yang dibebankan pemerintah kepada masyarakat (ekonomi rakyat) sepertihalnya pajak dan retribusi daerah. Seperti halnya nilai retribusi pedagang dari 33 pasar tradisional di Kota Yogyakarta yang mencapai Rp. 13 milyar pada tahun 2011.

Dalam hal ini justru rakyat kecil (pedagang) yang membiayai jalannya pemerintahan.

Keempat, kapasitas fiskal untuk mendorong transformasi kinerja dan struktur sosial-ekonomi Kota Yogyakarta yang masih terbatas, di mana nilai APBD tahun 2010 sebesar 66% dialokasikan untuk belanja pegawai, 20% untuk belanja barang dan jasa, sedangkan untuk belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja modal sebesar 14%. Berdasar data ini maka struktur APBD Kota Yogyakarta belum dapat menjadi tumpuan bagi penyelenggaraan ekonomi kerakyatan karena alokasi untuk menerapkan sistem jaminan lapangan kerja, sistem jaminan sosial (pendidikan dan kesehatan), dan sistem jaminan produksi dan pasar bagi seluruh warga masyarakat Kota Yogyakarta tanpa terkecuali masih terlalu kecil.

Kelima, omset UKM baru sebesar 20,6% dari total omset pelaku usaha di Kota Yogyakarta, yang dengan peranan APBD Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar 25% dari nilai PDRB maka dapat diperkirakan peranan sektor swasta besar yang dominan, lebih dari 50%. Kontribusi koperasi jauh lebih kecil lagi karena rata-rata baru 20% dari UKM yang menjadi bagian dari usaha koperasi. Nilai investasi industri kecil di Kota Yogyakarta pada tahun 2011 juga baru sebesar Rp. 170,69 milyar, atau senilai 1,3% dari total PDRB Kota Yogyakarta sebesar Rp. 12 trilyun.

Keenam, kondisi perkembangan koperasi di Kota Yogyakarta secara kuantitatif dan kualitatif juga masih belum

sepenuhnya mengarah pada sistem ekonomi kerakyatan. Pada akhir Desember 2011 jumlah koperasi aktif sebanyak 447 dari 550 koperasi yang terdaftar, dengan jumlah anggota yang baru sejumlah 50.280 orang atau hanya 7,3% dari total anggota koperasi di Propinsi DIY yang sebanyak 688.326 orang. Koperasi belum menjadi basis ekonomi masyarakat karena kualitasnya masih jauh dari idealita sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi Indonesia dan dunia. Jumlah koperasi pada tahun 2011 adalah 511 koperasi. Dari jumlah tersebut 81% atau 448 koperasi bersifat aktif, sedangkan sisanya pasif. Koperasi merupakan soko guru perekonomian yang didasarkan pada ekonomi kerakyatan.

Ketidaksesuaian dengan prinsip koperasi dan UU Koperasi tersebut ditunjukkan dengan lebih banyaknya koperasi yang hanya dimiliki oleh segelintir pemodal saja, semisal di hampir semua koperasi angkuta kota. Koperasi yang seperti ini lebih tepat disebut sebagai "persekutuan majikan", yang menempatkan orang-orang yang terlibat di dalamnya sebagai buruh dan atau konsumen saja. Padahal dalam koperasi seharusnya pelanggan dan pekerja adalah sekaligus pemilik, serta keanggotaannya bersifat terbuka dan sukarela.

Ketidaksesuaian dengan prinsip dasar tersebut berimplikasi selain pada minimnya jumlah dan partisipasi anggota, juga pada kecilnya volume usaha (omset) usaha koperasi di Kota Yogyakarta. Per 31

Desember 2011 volume usaha koperasi di Kota Yogyakarta baru sebesar Rp. 307 milyar trilyun atau hanya 2,36% dari total PDRB Kota Yogyakarta yang sebesar Rp. 12,96 trilyun pada tahun yang sama.

Kondisi inipun tidak dapat mewakili sepenuhnya kinerja koperasi rakyat (koperasi sejati), karena koperasi yang paling banyak dikembangkan di Kota Yogyakarta adalah koperasi pegawai, koperasi karyawan swasta, KSU, dan koperasi simpan pinjam, yang tidak dimiliki secara luas oleh masyarakat kebanyakan. Terlebih lagi pada tahun yang sama nilai SHU yang dapat dibagikan kepada seluruh anggota koperasi di Kota Yogyakarta baru sebesar Rp. 18,19 milyar, atau baru senilai 5,9% dari total omset koperasi di Kota Yogyakarta.

Ketujuh, partisipasi pekerja Kota Yogyakarta belum memadai, di mana baru terdapat 157 perusahaan yang memiliki serikat pekerja dari keseluruhan perusahaan di Kota Yogyakarta yang berjumlah 1.211 unit, dengan jumlah anggota serikat pekerja baru sebanyak 12.385 orang. Jumlah anggota ini bahkan kalah besar dibanding jumlah pencari kerja di kota Yogyakarta, dan sangat tidak signifikan dari segi jumlah dibanding total pekerja keseluruhan di Kota Yogyakarta yang berjumlah 200.000 lebih. Terlebih belum ada perusahaan di Kota Yogyakarta yang menerapkan pola kepemilikan saham oleh pekerja (*employee share ownership program/ESOP*).

Kedelapan, jenjang pendidikan tinggi masih menjadi barang mahal bagi sebagian warga Kota Yogyakarta yang berimplikasi pada lemahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh kaum marjinal di Kota Yogyakarta. Pun pendidikan yang berkembang pesat di Kota Yogyakarta dan sekitarnya bukan pendidikan yang berwatak progresif dan berorientasi pada keberdayaan ekonomi rakyat sehingga belum sepenuhnya mampu memecahkan persoalan kesejahteraan yang dihadapi mereka.

Warga Yogyakarta yang menamatkan pendidikan sampai dengan Perguruan Tinggi pada tahun 2010 adalah sebanyak 7,3%, lebih rendah di banding tahun 2008 yang sebanyak 10,4%. Padahal Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman merupakan sentra pendidikan tinggi bukan hanya di Propinsi DIY melainkan juga Indonesia. Sementara itu pendidikan informal bagi pelaku ekonomi rakyat di sektor basis Kota Yogyakarta yaitu perdagangan kecil, jasa informal, industri dan angkutan rakyat belum banyak dikembangkan secara sistematis berkelanjutan.

Kesembilan, kebebasan politik pasca reformasi belum diikuti keberadaan dan keberdayaan serikat-serikat ekonomi rakyat kota Yogyakarta yang dapat menjadi alat perbaikan taraf kesejahteraan mereka. Masih terlalu banyak pelaku-pelaku ekonomi marjinal yang belum terasosiasi dengan baik, seperti halnya tukang becak,

pemulung, pedagang asongan, industri rakyat, dan sebagainya. Pun serikat-serikat ekonomi yang ada di Kota Yogyakarta sepertihalnya koperasi rakyat dan serikat pekerja masih berada di posisi marginal, belum setanding dengan kekuatan pemodal (korporasi besar).

Kesepuluh, modal sosial ekonomi rakyat Kota Yogyakarta justru melemah seiring dengan massifnya penetrasi modal besar (internasional) dalam bentuk *hypermarket* (mal) dan ritel (*minimarket*) yang menggantikan pasar tradisional dan toko kelontong warga. Dalam pada itu, anggota masyarakat Yogyakarta pun tidak lagi sanggup membendung ekspansi bisnis hiburan di pusat-pusat kota yang menggerus modalitas spiritual pen-cirikhas Yogyakarta sebagai kota budaya. Sektor ekonomi rakyat di Kota Yogyakarta umumnya masih terjerat persoalan mendasar lemahnya penguasaan atas alat produksi seperti keterbatasan lahan, modal, IPTEK, dan pemasaran. Untuk memenuhi itu semua mereka masih harus bergantung pada perusahaan besar, tengkulak, dan sebagian pelepas uang.

Merujuk pada berbagai persoalan makro ekonomi daerah di atas, maka terlihat bahwa kinerja sektor jasa sebagai penyerap tenaga kerja terbesar yang masih rendah. Kondisi ini juga terkait dengan masih lemahnya keterkaitan (integrasi) dan jejering (*networking*) antarsektor yang menjadi landasan implementasi konsepsi

usaha bersama”(ko-operasi) dalam perekonomian daerah.

Konsepsi penyelenggaraan ekonomi kerakyatan di Kota Yogyakarta menjadi makin urgen mengingat indikator sasaran ekonomi kerakyatan yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Yogyakarta 2012-2017 hanyalah peningkatan jumlah koperasi aktif dan UMKM, serta pengawasan keamanan pangan. Indikator ini tentu saja sangat jauh dari yang dikonsepsikan dalam ekonomi kerakyatan.

1.6.2. Ekonomi Kerakyatan dalam Dokumen Perencanaan Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang mempunyai komitmen terhadap konsep ekonomi kerakyatan. Hal ini tertuang dalam dokumen perencanaan (RPJMD 2012-2016) yang salam visinya secara tegas dan eksplisit menyebutkan kata “ekonomi kerakyatan” yang belum ada pada RPJMD 2007-2011. Keberpihakan tersebut dapat dilihat pada visi, misi, tujuan dan sasaran, srategi umum, serta strategi dan arah kebijakan.

Visi Kota Yogyakarta yang berbunyi “Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas, berkarakter dan inklusif, pariwisata berbasis budaya, dan pusat pelayanan jasa, yang berwawasan lingkungan dan **ekonomi kerakyatan**”. Penjelasan ekonomi kerakyatan dalam visi tersebut adalah:

- 1) mendorong dan memfasilitasi berjalannya ekonomi kerakyatan yang berkualitas, berkelanjutan, berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta;
- 2) ekonomi kerakyatan yang dimaksud adalah perekonomian yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi daerah dengan kinerja ekonomi;
- 3) dan ekonomi daerah akan tumbuh dan berkembang, berbasis pada ekonomi rakyat dan mampu memberikan dampak nyata kepada rakyat.

Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa misi, yaitu:

- 1) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- 2) mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas;
- 3) **mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto;**
- 4) dan mewujudkan daya saing daerah yang kuat.

Penjelasan ekonomi kerakyatan dalam misi tersebut adalah:

- 1) **mengembangkan ekonomi kerakyatan;**

- 2) memperkuat masyarakat Kota Yogyakarta yang toleran, inklusif, bermoral, beretika, beradab dan berbudaya;
- 3) serta memasyarakatkan dan membudayakan gerakan Segoro Amarto.

Dari misi 3 dikembangkan menjadi tujuan dan sasaran, yaitu:

- 1) terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat;
- 2) terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat.

Selanjutnya, dijabarkan dalam strategi umum 3, yang terdiri dari:

- 1) mendorong dan memfasilitasi berjalannya ekonomi kerakyatan yang berkualitas, berkelanjutan, berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta;
- 2) ekonomi kerakyatan yang dimaksud adalah perekonomian yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi daerah dengan kinerja ekonomi;
- 3) fokusnya adalah menggerakkan perekonomian yang mampu mengurangi angka kemiskinan dan memperluas lapangan kerja, serta

- mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
- 4) dan dengan ini diharapkan ekonomi daerah akan tumbuh dan berkembang, berbasis pada ekonomi rakyat dan mampu memberikan dampak nyata kepada rakyat.

Strategi tersebut dijabarkan dalam arah dan kebijakan seperti di bawah ini.

- 1) Peningkatan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan.
 - a) Meningkatkan pembinaan koperasi dan lembaga keuangan mikro.
 - b) Meningkatkan kualitas sumber daya pelaku UMKM melalui fasilitasi permodalan, promosi, kerjasama usaha dan informasi usaha.
 - c) Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan di masyarakat.
 - d) Meningkatkan ketahanan pangan dan pengawasan kualitas bahan makanan.
- 2) Peningkatan pemberdayaan masyarakat yang berafirmatif gender.
 - a) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan.
 - b) Meningkatkan pemberdayaan, kualitas

- hidup serta perlindungan perempuan dan anak
- c) Meningkatkan pemberdayaan, kualitas.
- d) hidup serta perlindungan perempuan dan anak.

1.6.3. Strategi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Strategi menunjukkan awalan, arah, dan penekanan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di Kota Yogyakarta. Sesuai dengan realitas makro ekonomi daerah di atas, maka strategi tersebut akan meliputi:

Pertama, peningkatan kinerja sektor perdagangan kecil (pasar tradisional), angkutan rakyat, jasa informal, dan industri rakyat di Kota Yogyakarta sehingga mampu memberikan nilai tambah yang layak bagi peningkatan kesejahteraan mayoritas ekonomi rakyat yang bergiat di sektor tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan asosiasi (kooperasi) pelaku sektor perdagangan dan jasa, diversifikasi bisnis layanan perdagangan dan jasa, dan integrasi (interkoneksi) sektor perdagangan dan jasa dengan sektor lainnya (industri, pariwisata, pertanian, dan pengangkutan). Dalam hal ini kiranya Yogyakarta perlu belajar dari pusat pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis sektor jasa di Emilia Romagna, Italia sebagai *benchmark*.

Kinerja sektor jasa di Emilia Romagna bertumpu pada koperasi-koperasi sosial (*social cooperatives*) yang melayani

berbagai macam jasa di sektor sosial, pendidikan, kesehatan, bagi penyandang cacat, manula, pemuda, dan kelompok marjinal. Koperasi sosial yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Asosiasi Buruh, relawan, dan pengguna jasa ini bahkan sudah menguasai 85% dari seluruh distribusi jasa sosial ke masyarakat Emilia Romagna. Sektor jasa juga diperkuat melalui kerjasama (jejaring) antarperusahaan mikro (usaha mikro/koperasi) ke dalam asosiasi yang menyediakan jasa layanan administratif, koordinasi pembelian dan kredit, serta konsultasi teknis bagi mereka.

Di samping itu, terdapat perusahaan jasa yang dikelola bersama bernama ERVET yang mengelola sistem layanan jasa kepada usaha mikro/koperasi, di mana tugasnya adalah membuat analisis SWOT yang mereka butuhkan termasuk jasa layanan, infrastruktur, dan berbagai kebutuhan usaha mikro. ERVET berfungsi sebagai pusat jasa penciptaan jaringan (kemitraan) antarindustri, jasa transfer teknologi, manajemen baru, dan layanan pemasaran kepada sektor khusus berbasis wilayah dan bisnis tertentu.

ERVET juga mengembangkan pusat jasa sesuai spesialisasi bisnis melalui beberapa cabang usaha jasanya, yaitu CITER untuk fashion dan tekstile, CERCAL untuk footwear, QUASCO untuk bangunan dan konstruksi, CENTROCERAMICO untuk mechanical, CESMA untuk mesin pertanian, dan CESTER untuk teknologi dan

internasionalisasi. Jasa yang disediakan untuk berbagai industri tersebut meliputi jasa proses produksi, R&D, konsultasi, jasa teknis, dan pengembangan bisnis.

Sementara itu dibentuk pula CAN (Konfederasi Nasional Usaha Kecil) yang menyediakan dan memfasilitasi (brokers) jasa layanan keuangan, legal, pembukuan, pencarian (penempatan) tenaga kerja, nasihat pemasaran, ekspor, dan kemitraan untuk usaha mikro/kecil di Emilia Romagna.

Kedua, peningkatan kinerja industri rakyat berbasis pertanian (agroindustri) dan kerajinan di Kota Yogyakarta untuk mengoptimalkan nilai tambah bahan mentah pertanian, share yang dinikmati pengrajin, petani, dan lapangan kerja baru yang dapat dibuka. Hal ini dilakukan melalui pemberdayaan koperasi rakyat, aplikasi teknologi kerajinan dan pangan lokal, serta penyediaan, modifikasi, dan optimalisasi) *trading house* (outlet pasar) bagi aneka olahan produk kerajinan dan pertanian.

Ketiga, pengembangan koperasi sejati dan peningkatan kemitraan antarkoperasi baik di sektor yang sama maupun lintas sektoral di Kota Yogyakarta. Keberadaan ratusan unit koperasi aktif menjadi potensi dan kekuatan sosial-ekonomi luar biasa apabila dapat terajut kooperasi baik formal maupun informal diantara mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai model kemitraan (*partnership-MoU*) antara koperasi produksi (koperasi petani, koperasi pengrajin, koperasi industri, dsb), koperasi kredit

(KSP), koperasi retail (Koppas), koperasi jasa, dan koperasi konsumsi (koperasi karyawan, KPRI, dsb).

Keberadaan Konfederasi Koperasi Kota Yogyakarta perlu dipertimbangkan bila diperlukan sebagai simpul kemitraan dan perajut kemitraan antara koperasi – khususnya koperasi jasa sosial- dengan pelaku usaha lainnya sepertihalnya BUMD, lembaga keuangan, dan perusahaan swasta (industri),

Keempat, pengukuran Indeks Demokrasi Ekonomi (IDE) yang diperlukan untuk mengevaluasi derajat penerapan ekonomi kerakyatan Kota Yogyakarta setidaknya setiap 2/3 tahun sekali. Sebagai alat ukur dapat digunakan IDE hasil penelitian penulis yang terdiri dari tiga dimensi dan 21 variabel, dengan formulasi: $IDE = DP + DAK + DPFP$, di mana DP adalah Demokrasi Produksi, DAK adalah Demokrasi Alokasi dan Konsumsi, serta DPFP adalah Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi.

Kelima, pembangunan Sentra Ekonomi Kerakyatan di daerah beserta model-model serupa di semua kelurahan (kecamatan) di Kota Yogyakarta. Hal ini dilakukan sebagai salah satu strategi akselerasi dalam aplikasi dan pengembangan ekonomi kerakyatan di Kota Yogyakarta yang selanjutnya akan diuraikan di bawah ini.

1.6.4. Membangun Sentra Ekonomi Kerakyatan (*Ekora Center*)

Pembangunan Sentra Ekonomi Kerakyatan (Sentra Ekora) dilakukan untuk memfokuskan arah pembangunan wilayah, sektor, dan aktor ekonomi di Kota Yogyakarta pada agenda ekonomi kerakyatan yaitu peningkatan derajat kontrol dan partisipasi ekonomi warga melalui demokratisasi modal material, intelektual, dan institusional. Oleh karenanya, Sentra Ekora menggunakan pendekatan lintas wilayah, lintas sektoral, dan lintas pelaku, sehingga benar-benar berdasar dan mengarah pada konsepsi usaha bersama.

Sentra Ekora diwujudkan dalam lingkup kelurahan melalui pembangunan Sentra Ekora Kelurahan yang sekurang-kurangnya mengelola *production house*, *trading house*, dan *training house*, baik melalui koperasi, BUMDes, maupun klaster (sentra) industri kecil-rumah tangga dan asosiasi usaha mikro lain yang ada di kelurahan setempat. Untuk itu perlu penguatan kelembagaan ekonomi rakyat (koperasi), teknologi pengolahan bahan baku lokal, SDM, dan sektor bisnis yang akan dikembangkan.

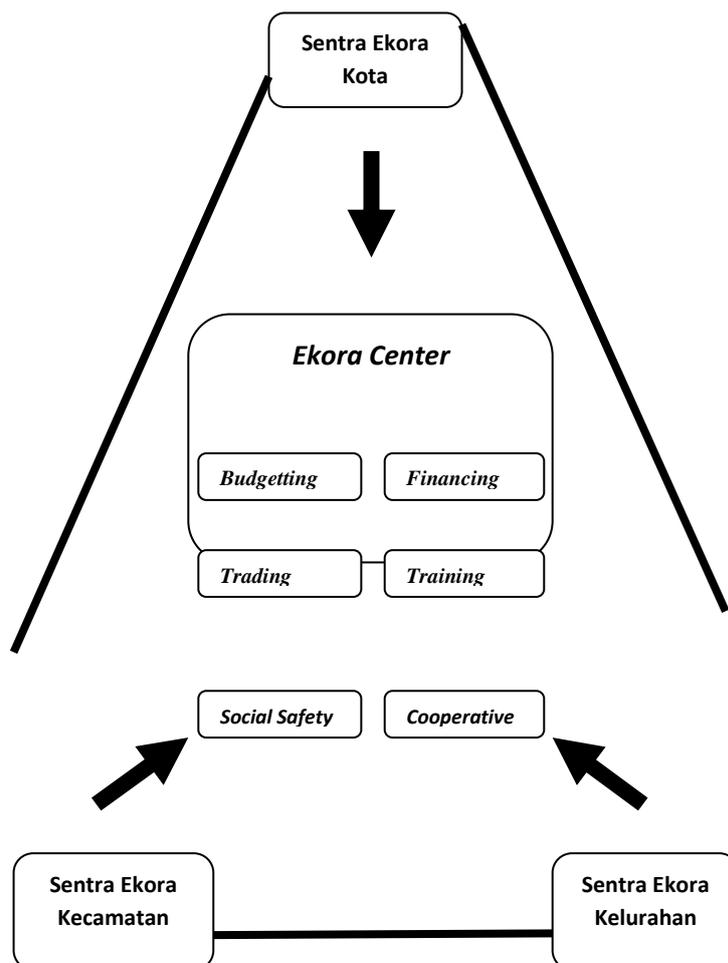
Dalam lingkup daerah (Kota) maka Sentra Ekora diwujudkan melalui pembangunan *Ekora Center*, sebagai *single window* ekonomi kerakyatan Kota Yogyakarta yaitu sebuah area dan bangunan yang menjadi pusat partisipasi penyusunan APBD (*Budgetting Center*),

permodalan lokal (*Local Financing Center*), Bisnis dan Perdagangan (*Business & Trading Center*), inovasi teknologi dan pelatihan ekonomi kerakyatan (*Innovation & Training Center*), jaminan sosial (*Social Safety Center*), dan gerakan koperasi (*Cooperative Center*).

Ekora Center ini ditopang dan memiliki keterkaitan formal dengan Sentra Ekora dan berbagai elemen kelembagaan usaha bersama (ko-operasi) yang terdapat

di tiap-tiap kelurahan (kecamatan). Sebagai manifestasi usaha bersama maka kepemilikan, pengambilan keputusan, dan tanggung jawab (pengawasan) *Ekora Center* dilakukan secara kolektif oleh Pemkot, Sentra Ekora Kelurahan, dan berbagai elemen usaha bersama lain seperti halnya asosiasi bisnis, serikat pekerja, koperasi, dengan ketentuan dan mekanisme yang diatur bersama

Gambar 1.1 Model Sentra Ekonomi Kerakyatan Kota Yogyakarta



Ekora Center berfungsi sebagai simpul penghubung antarsentra ekora kelurahan, dan antara sentra ekora kelurahan dan warga Kota Yogyakarta dengan Pemkot Yogyakarta, BUMD, konsumen, dan berbagai elemen lainnya. Ekora Center harus mewedahi *supply*

produksi ekonomi rakyat (usaha mikro), peran pedagang tradisional, dan koperasi Kota Yogyakarta. Keberadaan Ekora Center adalah untuk menjadi penyedia jasa layanan (fasilitasi) bagi pengembangan usaha mereka dan bukannya menggantikan posisi atau bahkan meminggirkan mereka.

Tabel 1.1 Gambaran Fungsi Dalam Sentra Ekonomi Kerakyatan

Lingkup Sentra	Elemen Sentra	Fungsi
Kelurahan	Production House	Koordinasi penyediaan alat produksi (modal, bahan mentah, dsb), pengolahan bahan baku, kemitraan antarprodusen, pemberdayaan koperasi, pelibatan perempuan, dsb
Kelurahan	Trading House	Koordinasi pembelian alat produksi dan kebutuhan sehari-hari, serta penjualan hasil produksi secara kolektif, outlet pasar bagi aneka produk olahan pertanian, dsb
Kelurahan	Training House	Koordinasi pelatihan aplikasi teknologi, inovasi kelembagaan (koperasi), perencanaan pembangunan desa, aplikasi ekonomi kerakyatan, keahlian teknis, dsb
Daerah (Ekora Center)	Budgetting Center	Pusat pelibatan warga dan parapihak Sentra Ekora (khususnya usaha mikro/koperasi) dalam penyusunan APBD (perencanaan anggaran), dsb
Daerah (Ekora Center)	Local Financing Center	Pusat penyediaan informasi, konsultasi, kemitraan, dan sumber permodalan dari lembaga keuangan lokal bagi usaha mikro/koperasi
Daerah (Ekora Center)	Business & Trading Center	Pusat konsultasi bisnis dan outlet pasar (penjualan) bagi semua produk Sentra Ekora Kelurahan, usaha mikro/koperasi, dan pedagang kecil khas Yogyakarta.
Daerah (Ekora Center)	Innovation & Training Center	Pusat inovasi dan pelatihan aplikasi teknologi pertanian, industri, jasa, perencanaan ekonomi daerah, dan aplikasi ekonomi kerakyatan
Daerah (Ekora Center)	Social Safety Center	Pusat informasi, konsultasi, dan penyediaan jasa/ layanan jaminan sosial (pendidikan, kesehatan, fakir miskin, anak terlantar, kelompok marjinal, dsb)
Daerah (Ekora Center)	Cooperative Center	Pusat kemitraan antarkoperasi, perencanaan bisnis bersama koperasi, pengembangan asosiasi usaha dan jejaring antarsentra ekora dan antarpelaku usaha mikro di Kota Yogyakarta

Sebagian konsep ini tentu sudah berkembang di Kota Yogyakarta walaupun belum sepenuhnya mengarah pada transformasi struktural dan model usaha bersama yang mencerminkan kepemilikan, penentuan, dan tanggung jawab kolektif, serta bersifat lintas wilayah, lintas sektoral, dan lintas pelaku. Oleh karenanya, sinergitas sebagai modal sosial ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam konsepsi Sentra Ekonomi Kerakyatan perlu dikembangkan melalui langkah-langkah nyata yang diuraikan di bagian akhir paper ini.

1.7. Kesimpulan dan Rekomendasi

1.7.1. Kesimpulan

Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka sistem ekonomi kerakyatan tidak didasarkan pada paradigma lokomotif, melainkan pada paradigma fondasi. Artinya, peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka sistem ekonomi kerakyatan tidak lagi bertumpu pada dominasi pemerintah pusat, pasar ekspor, modal asing, dan perusahaan konglomerasi, melainkan pada kekuatan pemerintah daerah, sumberdaya domestik, partisipasi para pekerja, usaha industri rakyat, serta pada pengembangan koperasi sejati, yaitu yang berfungsi sebagai fondasi penguatan ekonomi rakyat Kota Yogyakarta.

Di tengah-tengah situasi perekonomian dunia yang dikuasai oleh kekuatan kapitalisme kasino seperti saat ini, kekuatan pemerintah daerah, sumberdaya

dan pasar domestik, partisipasi para pekerja, usaha-usaha industri rakyat, serta jaringan koperasi sejati, sangat diperlukan sebagai fondasi tahan gempa keberlanjutan perekonomian Kota Yogyakarta. Di atas fondasi ekonomi tahan gempa itulah selanjutnya sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan akan diselenggarakan.

Sejalan dengan perspektif ekonomi kerakyatan tersebut, maka beberapa agenda demokratisasi modal perlu dikerjakan sebagai pilar operasional pengembangan ekonomi kerakyatan di Kota Yogyakarta, yaitu:

Pertama, demokratisasi modal intelektual dilakukan dengan mempermurah biaya pendidikan tinggi, membangun watak pendidikan tinggi di Yogyakarta sehingga lebih ideologis, kontekstual, dan berorientasi pada keberdayaan petani, buruh, dan sektor ekonomi rakyat marjinal lainnya. Perlu juga dikembangkan *training house* di kampung-kampung, pasar-pasar, dan komunitas masyarakat lainnya, yang dikelola secara swadaya-kolektif sebagai alat pengambilalihan kuasa ilmu pengetahuan dan teknologi oleh masyarakat luas.

Kedua, demokrasi modal institusional dilakukan melalui peningkatan peran Koperasi dan Serikat Pekerja, pembentukan dan peningkatan peran serikat-serikat ekonomi kelompok marjinal seperti halnya tukang becak, pemulung, buruh tani penggarap, pedagang asongan,

pedagang kecil, dan sebagainya, serta memperkuat jejaring di antara serikat ekonomi rakyat tersebut. Secara khusus penguatan kerjasama keanggotaan, kemitraan, permodalan, dan penguasaan IPTEK oleh koperasi dapat dilakukan melalui pendirian Bursa Kooperasi Yogyakarta, sebagai institusi alternatif dari Pasar Modal (Bursa Efek Indonesia). Di samping itu perlu fasilitasi MoU antara koperasi tani di desa dengan koperasi karyawan (serikat buruh) di kota dalam pembelian produk-produk pertanian.

Ketiga, demokratisasi modal material dilakukan melalui aplikasi *pro-poor budgeting* untuk meningkatkan kinerja layanan publik dan memperbesar proporsi APBD untuk perluasan skim jaminan sosial bagi warga Kota Yogyakarta. Di samping itu, perlu dukungan permodalan bagi sektor informal, dan fasilitasi perluasan akses pasar ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar tradisional, pembatasan ekspansi ritel, dan pembuatan *minimarket* milik serikat buruh atau koperasi di Yogyakarta di tempat strategis (pusat kota).

1.7.2. Rekomendasi

Beberapa langkah nyata perlu dilakukan untuk mewujudkan berbagai gagasan, konsep, strategi di atas, yang dalam hal ini melibatkan parapihak ekonomi kerakyatan daerah seperti halnya Pemerintah Kota, DPRD, Pemerintah Kecamatan/Kelurahan, Koperasi, Asosiasi Usaha, LSM, media massa, ormas, perusahaan swasta, serikat pekerja, dan

berbagai elemen lain di Kota Yogyakarta. Beberapa langkah yang perlu ditempuh parapihak tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, perencanaan aplikasi dan pengembangan ekonomi kerakyatan di Kota Yogyakarta, yang dituangkan dalam RPJMD atau Rencana Kerja Tahunan, penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Kota Yogyakarta yang sudah memuat perencanaan program dan kegiatan yang dapat dibiayai APBD. Proses perencanaan dan dokumentasi ini dilakukan pada tahun pertama.

Kedua, pelaksanaan dilakukan melalui pembuatan payung hukum (Perda atau SK Walikota), penganggaran berbagai program di APBD, dan pembentukan Tim Adhoc parapihak (semisal Tim Pengembangan Ekonomi Kerakyatan-TIPEKA) untuk mempertegas komitmen pemerintah dan DPRD, serta pelaksanaan berbagai program yang dapat dimulai pada akhir tahun kedua, termasuk realisasi pembangunan Sentra Ekonomi Kerakyatan (Ekora Center) Kota Yogyakarta.

Ketiga, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan ekonomi kerakyatan di Kota Yogyakarta, di mana proses evaluasi dimulai pada tahun ketiga dan selanjutnya monev internal setiap akhir tahun dengan pengukuran Indeks Demokrasi Ekonomi (IDE) Kota Yogyakarta setiap 2 tahun sekali.

Partisipasi parapihak sangat menentukan keberhasilan agenda ini sejalan dengan hakekat pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan partisipasi dan kontrol warga Kota Yogyakarta atas jalannya perekonomian daerah. Tidaklah berlebihan jika mengidealkan kondisi daerah seperti halnya di Emilia Romagna, Italia di mana duapertiga (60%) warga adalah pegiat koperasi, 45% PDRB dihasilkan dari koperasi, 85% jasa sosial didistribusikan oleh koperasi, dan terdapat pusat pendidikan (universitas) –*University of Bologna*– yang berorientasi pada keberdayaan ekonomi rakyat dan koperasi.

Keberadaan Sentra Ekonomi Kerakyatan Kota Yogyakarta, sebagai pelopor model pengembangan ekonomi kerakyatan di Indonesia dalam satu area (bangunan) fisik yang terintegrasi (terhubung) dengan model serupa di kelurahan-kelurahan mudah-mudahan akan menginspirasi daerah lain untuk berbuat yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Baswir, Revrisond (1995), *Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Kedaulatan Rakyat*, dalam

Baswir (1997), *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

_____ (1999a), *Dari Ekonomi*

Rakyat ke Ekonomi Kerakyatan, HU *Jawa Pos*, Surabaya, 25 Januari

_____ (1999b), *Menuju Politik Pembangunan Kerakyatan*, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Politik*, Indef, Jakarta, Vol. 3 Nomor 2

_____ (2000), *Koperasi dan Kekuasaan Dalam Era Orde Baru*, *HU Kompas*, Jakarta, 1 Januari

_____ (2002), *Demokrasi Ekonomi dan Bung Hatta*, dalam Sri-Edy Swasono, *Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat*, Yayasan Hatta, Jakarta

_____ (2011), *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Dahl, Robert A. (1992), *Demokrasi Ekonomi: Sebuah Pengantar* (diterjemahkan oleh Ahmad Setiawan Abadi), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,

Djojohadikusumo, Sumitro (1996), *Mengungkap 30 Persen Kebocoran Anggaran*, *Harian Umum Republika*, Jakarta, 12 Januari

Goerge, Susan (1999), *A Short History of Neoliberalism: Twenty Years of Elite Economics and Emerging Opportunities For Structural Change*, <http://www.millenniumround.org>

Hamid, Edy Suandi. (2005). *Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Hamid, Edy Suandi. (2004). *Sistem Ekonomi, Utang Luar Negeri, dan Politik-Ekonomi*, Yogyakarta: UII Press.

Hatta, Mohammad (1928), *Indonesia Merdeka*, diterbitkan kembali tahun 1976, Bulan Bintang, Jakarta

_____ (1932), *Ke Arah Indonesia Merdeka*, diterbitkan kembali dalam bentuk edisi khusus tahun 1994, Dekopin, Jakarta

_____ (1933), *Ekonomi Rakyat*, dalam Hatta, *Kumpulan Karangan Jilid 3*,

- Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1954
- _____ (1934), *Ekonomi Rakyat Dalam Bahaya*, dalam Hatta, *Kumpulan Karangan, Jilid 3*, Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1954
- _____ (1952), *Amanat Hari Koperasi Kedua*, dalam Hatta, *Kumpulan Karangan Jilid 3*, Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1954
- _____ (1960), *Demokrasi Kita*, disunting dalam Swasono dan Ridjal (1992), UI Press, Jakarta
- _____ (1980), *Berpartisipasi Dalam Perjuangan Kemerdekaan Nasional Indonesia*, Yayasan Idayu, Jakarta
- _____ (1981), *Indonesian Patriot (memoirs)*, disunting oleh CLM Penders, MA, PhD., Gunung Agung, Singapura
- Hudiyanto. (2004). *Ke luar dari Ayun Pendulum Kapitalisme-Sosialisme*. Yogyakarta: UMY Press.
- Hudiyanto. (2001). *Ekonomi Indonesia: Sistem dan Kebijakan*. Yogyakarta: PPE UMY.
- Hudson, Michael (2003), *Super Imperialism: The Origin and Fundamentals of US World Dominance*, Pluto Press, London
- Kota Yogyakarta, 2012, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Yogyakarta 2012-2016*
- _____, berbagai tahun, *Data dari Berbagai Dinas yang Relevan*, Tidak Diterbitkan
- Legge, J.D. (1993), *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan kelompok Sjahrir*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Mrazek, Rudolf (1996), *Sjahrir: Politik dan Pengasingan di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Noer, Deliar (1991), *Mohammad Hatta: Biografi Politik*, LP3ES, Jakarta
- Mubyarto (1979), *Gagasan dan Metode Berpikir Tokoh-tokoh Besar Ekonomi dan Penerapannya Bagi Kemajuan Kemanusiaan* (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, 19 Maret 1979)
- Mutis, Thoby, 2002, *Cakrawala Demokrasi Ekonomi*, Tiara Wacana, Yogyakarta
- Perkins, John (2004), *Confession on An Economic Hit Man*, Berret- Koehler Publishers, Inc., San Fransisco
- Poole, Michael, 1987, *The Origin of Economic Democracy*, Routledge, London
- Rachbini, Didik J, 2001, *Politik Ekonomi Baru Menuju Demokrasi Ekonomi*, Grasindo, Jakarta
- Santosa, Awan (2009), *Ekonomi Kerakyatan: Urgensi, Konsep, dan Aplikasi*, Sekra-UMBY Press, Yogyakarta
- Smith, J.W., 2000, *Economic Democracy: Political Struggle in Twenty-first Centuries*, New York, M.E. Sharpe.
- Svante, Erricson & Jan-Eric Lane, 2002, *Demokratisasi Pertumbuhan*, RajaGarfindo, Jakarta
- Swasono, Sri Edi, 1987, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, UI Press, Jakarta
- Williams, 2002, *Bologna and Emilia Romagna: A Model of Economic Democracy*, diakses di internet tanggal 12/8/07 jam 09.49 WIB.